



Editorial:

Perdamaian dalam Hubungan Internasional (*Peace in International Relations*)

Junita Budi Rachman, Arry Bainus

Borrowing Absolute and Relative Gains to Science Diplomacy Conceptualization

Muhammad Fikry Anshori, Mutiara Rachmadini Effendi

Abenomics, Diplomasi Ekonomi dan Ekspor Infrastruktur Jepang di Indonesia

Nurul Aulia, Lucyana Kumala

Kejahatan Terorganisir Transnasional:

Penyelundupan Manusia dalam Jaringan Snakeheads Cina

Angelica Putri Arindrayani, Sarah Anabarja

Tantangan Keamanan dan Strategi Adaptif Filipina dalam Rivalitas Amerika Serikat dan China di Kawasan Asia Pasifik

Tomi Oktavianor, M. Najeri Al Syahrin

Penguatan dan Tantangan Soft Diplomacy Australia di Kawasan Indo-Pasifik

Rizki Damayanti

Donald Trump's Foreign Policy: Withdrawal from International Regimes and Organizations

Muhammad Alfian Maulana, Nur Rachmat Yuliantoro

Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the Fulfillment of the Educational Rights of Autistic Children in Makassar, Indonesia

Atika Puspita Marzaman, Adi Suryadi Culla, Annisa Fauziah Lawi

Paradiplomacy of West Nusa Tenggara Province in Achieving Net-Zero Emission

Ismah Rustam, Alwafi Ridho Subarkah, Lalu Putrawandi Karjaya

European Union's Forest Fire Policies Implementation in the Post-Pandemic Age

Daniel Jeremia Natanael Nababan, Henny Saptatia Drajati Nugrahani

Finland's Strategic Shift: A New Chapter with NATO Membership

Yonarisman Muhammad Akbar, Dina Fadiyah

Kepentingan dan Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik

Asep Kamaluddin Nashir





PENGUATAN DAN TANTANGAN SOFT DIPLOMACY AUSTRALIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Rizki Damayanti^{1*}

¹Universitas Paramadina

*email: rizki.damayanti@paramadina.ac.id

Abstract

This research aims to investigate the strengthening and challenges faced by Australia's soft diplomacy in the Indo-Pacific region. The main focus of the research is on how Australia strengthens its presence in the Indo-Pacific region through various forms of public diplomacy, including cultural diplomacy, educational scholarships (New Colombo Plan and Australia Awards), and media diplomacy. The theory used is soft diplomacy which suggests that a country's influence in international relations is not only determined by military or economic strength, but also by its ability to influence and win the hearts and minds of people in other countries. The research method is a qualitative approach with data analysis from various sources of academic literature and official government documents. The research findings show that Australia has actively used soft diplomacy, but the research also identified that the soft diplomacy implemented by Australia in the Indo-Pacific region still has many weaknesses as a result of diplomatic tensions, perceptions of the Hyper-Pacific, limited resources, the complexity of regional dynamics, and Australia's inconsistency in determining priorities .

Keywords: *Australia, Hyper-Pacific perception, Indo-Pacific region, soft diplomacy, soft power*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penguatan dan tantangan yang dihadapi oleh *soft diplomacy* Australia di kawasan Indo-Pasifik. Fokus utama pada penelitian adalah bagaimana Australia memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik melalui berbagai bentuk diplomasi publik, termasuk diplomasi budaya, beasiswa pendidikan (*New Colombo Plan* dan *Australia Awards*), dan diplomasi media. Teori yang digunakan adalah *soft diplomacy* yang mengemukakan bahwa pengaruh suatu negara dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan untuk memengaruhi dan memenangkan hati dan pikiran masyarakat di negara lain. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber literatur akademis dan dokumen resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Australia telah aktif menggunakan *soft diplomacy*, namun penelitian juga mengidentifikasi bahwa *soft diplomacy* yang dijalankan Australia di kawasan Indo-Pasifik masih memiliki banyak kelemahan sebagai akibat dari terjadinya ketegangan diplomatik, persepsi *Hyper-Pacific*, keterbatasan sumber daya, kompleksitas dinamika regional, serta ketidak-konsistenan Australia dalam menentukan prioritas.

Kata Kunci: *Australia, kawasan Indo-Pasifik, persepsi Hiper-Pasifik, soft diplomacy, soft power*

Pendahuluan

Dalam Australian Foreign Policy White Paper 2017, dinyatakan bahwa pelaksanaan diplomasi Australia ditujukan untuk membuat Australia menjadi negara yang lebih kuat, lebih aman dan lebih sejahtera, yang ditempuh dengan jalan mempromosikan dan melindungi kepentingan internasional Australia, sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global. Dinyatakan pula bahwa tujuan diplomasi Australia akan dapat dicapai melalui kerja sama dengan mitra bilateral dan berbagai forum multilateral (Australian Government, 2017a). Perkembangan demokrasi di kawasan Indo-Pasifik, khususnya pada negara-negara yang menjadi mitra bilateral utama Australia seperti Jepang, Indonesia, India, dan Republik Korea merupakan prioritas utama karena dipandang akan ikut mempengaruhi tatanan kawasan (Adducul, 2018).

Kawasan Indo-Pasifik sendiri memiliki arti penting bagi Australia karena beberapa alasan strategis, ekonomi, dan keamanan. Beberapa alasan utama mengapa Australia memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik, di antaranya terkait keamanan dan pertahanan, hubungan ekonomi, aliansi keamanan, sumber daya alam dan energi, diplomasi regional, dan isu lingkungan (Bateman, 2017). Terkait keamanan dan pertahanan, Australia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Indo-Pasifik yang luas. Kawasan ini meliputi banyak negara, beberapa diantaranya memiliki potensi ancaman keamanan seperti konflik militer, terorisme, dan perubahan rezim. Oleh karena itu, Australia memiliki kepentingan besar dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Dalam konteks hubungan ekonomi, sebagai salah satu kawasan ekonomi paling besar di dunia, banyak negara di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi mitra dagang utama Australia, dimana Australia sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara di kawasan ini terutama dengan China, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Bateman, 2017).

Terkait aliansi keamanan, Australia merupakan anggota dari beberapa aliansi keamanan internasional dan regional yang terjalin di antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu yang paling penting adalah aliansi dengan Amerika Serikat (AS) melalui *Australia, New Zealand, United States Security Treaty* (ANZUS). Disamping itu, Australia merupakan bagian dari The Quad atau yang secara resmi disebut *the Quadrilateral Security Dialogue* yang merupakan aliansi dari empat negara, yaitu AS, Australia, India, dan Jepang, dalam kerja sama penanganan masalah keamanan, ekonomi,

dan kesehatan (Karim, 2022). Perkembangan mutakhir adalah bergabungnya Australia, United Kingdom, dan United States of America (AUKUS) yang merupakan pakta pertahanan terkait pengembangan bersama dari pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya pembangunan kapal selam bertenaga nuklir (Fullilove, 2022). Kehadiran AS di kawasan ini dipandang memberikan perlindungan keamanan yang signifikan bagi Australia.

Dalam bidang sumber daya alam dan energi, kawasan Indo-Pasifik memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral, gas, dan minyak. Australia memiliki kepentingan ekonomi dalam mengakses dan mengelola sumber daya ini. Selain itu, keamanan pasokan energi dari kawasan ini sangat penting bagi kestabilan ekonomi Australia. Sementara dalam konteks diplomasi regional, Australia aktif berperan di kawasan Indo-Pasifik untuk mempromosikan kerja sama dan penyelesaian konflik. Negara ini terlibat dalam berbagai forum multilateral seperti ASEAN, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO). Terakhir, isu lingkungan, khususnya perubahan iklim di kawasan Indo-Pasifik dapat memiliki dampak besar bagi Australia. Terkait hal ini, Australia memiliki kepentingan dalam berkolaborasi dengan negara-negara di kawasan ini untuk mengatasi isu-isu lingkungan seperti peningkatan suhu global dan kenaikan permukaan air laut (Bateman, 2017).

Dalam kenyataannya, besarnya kepentingan nasional Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik tersebut, juga disertai dengan fakta masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi Australia, yang sekaligus berpotensi menjadi kelemahan dan batu sandungan dalam peningkatan dan keberhasilan pencapaian tujuan *soft diplomacy*-nya (Byrne et al., 2016). Berlandaskan pada pemaparan di atas, tulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana upaya Australia dalam membangun pengaruh yang positif di kawasan Indo-Pasifik dan di panggung global melalui *soft diplomacy*.

Kemampuan *soft diplomacy* Australia tentu juga terkait dengan kebijakan politik dan perubahan pemerintahan dalam negeri Australia yang ikut mempengaruhi konsistensi dan prediktabilitas *soft diplomacy*-nya, dimana ketidakstabilan dalam politik domestik dapat menciptakan ketidakpastian dalam hubungan luar negeri Australia (Byrne et al., 2016). *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) memegang peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan strategi *soft diplomacy* ini. Namun, dalam

menghadapi dinamika geopolitik global saat ini, DFAT dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas upaya *soft diplomacy* Australia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DFAT adalah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar untuk memperluas pengaruh mereka melalui *soft diplomacy*. Negara-negara seperti China dan Rusia telah meningkatkan investasi mereka dalam program-program budaya, pendidikan, dan kebudayaan untuk meningkatkan citra mereka di mata dunia. Hal ini menempatkan Australia dalam posisi dimana DFAT harus berinovasi dan menyesuaikan strateginya untuk tetap relevan dan efektif dalam persaingan ini (McDougall, 2018). Terkait hal ini, tulisan ini secara spesifik juga akan membahas peran dan tantangan DFAT dalam mengimplementasikan *soft diplomacy* Australia, serta menganalisis bagaimana urgensi penguatan *soft diplomacy* yang ditempuh melalui investasi dalam pendidikan, pertukaran budaya, bahasa, dan media, pada kenyataannya dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi sumber kelemahan dari keberhasilan *soft diplomacy* Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik.

Soft Diplomacy dalam Diplomasi Publik

Dalam mencermati urgensi penguatan dan tantangan *soft diplomacy* yang dijalankan Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik, penting untuk memahami bagaimana Australia merumuskan dan mengimplementasikan berbagai elemen *soft diplomacy* yang dimilikinya. *Soft diplomacy* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Joseph S. Nye Jr. pada awal 1990-an. *Soft diplomacy* mengacu pada upaya diplomatik yang lebih bersifat non-konfrontasional dan persuasif dalam mencapai tujuan luar negeri suatu negara. Proses ini melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti budaya, nilai-nilai, diplomasi publik, diplomasi pendidikan, dan diplomasi lingkungan yang ditujukan untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku negara-negara lain. Tantangan dalam menjalankan *soft diplomacy* meliputi perubahan dalam dinamika regional dan global, kompetisi dengan negara-negara lain yang menggunakan *soft power* secara efektif, serta tantangan dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai dan budaya nasional di luar negeri (Nye Jr, 2011).

Terdapat keterkaitan erat antara penggunaan *soft diplomacy* dengan pelaksanaan diplomasi publik (Nye Jr., 2022). Tujuan utama dari diplomasi publik ini tidak hanya memunculkan atau membentuk sikap saling menghormati namun juga menimbulkan

ketertarikan. Kekuatan “daya tarik” yang dimiliki sebuah negara akan menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam upaya melengkapi diplomasi tradisional yang didasarkan kepada kekuatan ekonomi atau militer.

Diplomasi publik didefinisikan sebagai sumber baru “*soft power*” bagi pemerintah. Leonard menyatakan bahwa bila penekanan era “*hard power*” terletak pada “proyeksi kekuatan”, maka era “*soft power*” terletak pada “kemitraan”, dimana pemerintah sebuah negara harus mampu bukan hanya menjaga kualitas komunikasi dengan mitra non-tradisional, tetapi juga kepada para aktivis publik global dan masyarakat luas di negara lain (Leonard et al., 2002).

Terdapat lima elemen dari diplomasi publik, yaitu mendengarkan (*listening*), advokasi (*advocacy*), diplomasi budaya (*cultural diplomacy*), diplomasi pertukaran (*exchange diplomacy*), dan penyiaran berita internasional (*international news broadcasting*) (Cull, 2008). Elemen mendengarkan (*listening*) dimaknai sebagai upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasionalnya dengan cara mengumpulkan dan menyusun data terkait pendapat publik di luar negeri, dimana data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan kebijakannya atau untuk kepentingan pendekatan diplomasi publiknya yang lebih luas. Secara tradisional, mendengarkan (*listening*) telah menjadi elemen dari setiap praktik diplomasi publik, baik dalam bentuk advokasi, diplomasi budaya, pertukaran, ataupun penyiaran berita internasional. Dalam bentuknya yang paling dasar, elemen mendengarkan (*listening*) ini mencakup sebuah peristiwa dimana aktor internasional mencari dan melibatkan audiens asing untuk kemudian melakukan proses mendengarkan. Informasi yang didapat kemudian dinyatakan sebagai opini publik asing. Dalam konteks ini, maka diplomasi publik berperan dalam menanggapi pergeseran opini internasional (Cull, 2008).

Berikutnya, elemen advokasi (*advocacy*) dalam diplomasi publik dimaknai sebagai upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasionalnya melalui kegiatan komunikasi internasional, yaitu secara aktif mempromosikan kebijakan, gagasan, atau kepentingan umum aktor tertentu kepada publik asing. Hal ini misalnya ditempuh melalui hubungan komunikasi yang dijalankan oleh pers kedutaan dalam mempromosikan kebijakan negaranya. Terdapat pula elemen diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) yang merupakan upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasionalnya dengan cara membuat sumber daya dan potensi budayanya menjadi dikenal di luar negeri dan/atau memfasilitasi

transmisi budaya ke luar negeri. Secara historis, diplomasi budaya berarti kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi ekspor budayanya. Peran ini misalnya dijalankan oleh *British Council* atau *Italian Cultural Institute* (Cull, 2008).

Elemen diplomasi publik lainnya adalah diplomasi pertukaran (*exchange diplomacy*) yang merupakan upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasionalnya dengan cara mengirimkan warganya ke luar negeri dan secara timbal balik menerima warga negara dari luar negeri untuk masa studi dan/atau akulturasi. Meskipun hal ini dapat dikonseptualisasikan sebagai proses satu arah, tetapi adanya unsur timbal balik yang terjadi di dalam proses pertukaran (*exchange*) akan memungkinkan terjadinya proses komunikasi dua arah, sehingga cenderung menjadikan elemen dari diplomasi publik ini sebagai konsep mutualitas (*mutuality*), dimana kedua belah pihak yang menjalankan pertukaran (*exchange*) ini akan diuntungkan. Pertukaran (*exchange*) sering kali dipandang sebagai elemen yang tumpang-tindih dengan kegiatan diplomasi budaya, sekaligus juga dapat digunakan untuk pencapaian tujuan kebijakan dan/atau advokasi tertentu. AS adalah contoh negara yang menggunakan elemen pertukaran (*exchange*) dalam diplomasi publiknya, misalnya melalui program Beasiswa *Fulbright* (Cull, 2008).

Terakhir, elemen penyiaran berita internasional (*international news broadcasting*) dalam diplomasi publik, yang dinyatakan sebagai upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasionalnya dengan cara menggunakan teknologi radio, televisi, dan internet untuk berinteraksi dengan publik asing. Elemen diplomasi publik ini juga dapat menjadi tumpang-tindih dengan semua fungsi diplomasi publik lainnya, misalnya elemen mendengarkan (*listening*) termuat dalam fungsi pemantauan/penelitian audiens, elemen advokasi/informasi termuat dalam proses editorial atau siaran kebijakan, diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) termuat dalam konten budayanya, dan pertukaran (*exchange*) dimungkinkan dimuat dalam pertukaran program dan personel dengan lembaga penyiaran lainnya. Namun penting untuk digaris-bawahi bahwa secara khusus, elemen paling kuat dari penyiaran berita internasional (*international news broadcasting*) ini adalah penggunaan berita, terutama ketika berita itu disampaikan secara objektif (Cull, 2008).

Diplomasi publik, termasuk *soft diplomacy*, beroperasi di bawah otoritas dan tanggung jawab pemerintah negara. Dalam hal ini, departemen luar negeri dan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti kementerian budaya atau pariwisata, bertanggung jawab

untuk merancang dan melaksanakan strategi diplomasi publik. Namun, dalam konteks global yang semakin terhubung, aktor-aktor non-pemerintah juga dapat berperan penting dalam diplomasi publik. Mereka dapat menjadi mitra atau pelaku dalam inisiatif *soft diplomacy* yang didukung oleh pemerintah, atau bahkan melakukan kegiatan diplomasi publik sendiri yang dapat mempengaruhi opini publik dan membangun hubungan internasional. Meskipun demikian, penekanan utama dalam studi hubungan internasional tetap pada peran negara dalam merancang dan melaksanakan strategi diplomasi publik, termasuk *soft diplomacy*, sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka (Melissen, 2005).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencakup informasi deskriptif dan analisis dari berbagai sumber data. Data diperoleh melalui studi literatur, termasuk berbagai literatur akademis dan dokumen resmi pemerintah Australia, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk merangkum informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami konteks, pola, dan tren yang muncul dari data serta memberikan interpretasi terhadap hasil temuan. Dalam penelitian ini, penggunaan *soft diplomacy* sebagai instrumen diplomasi publik Australia akan dilihat sebagai upaya Australia dalam membangun dan memperkuat citra positif Australia di kawasan Indo-Pasifik, yang ditempuh melalui diplomasi budaya (*cultural diplomacy*), diplomasi pendidikan (*education diplomacy*), dan diplomasi media (*media diplomacy*). Validitas data dijamin dengan memperoleh data dari berbagai sumber yang dapat diverifikasi kembali, sementara reliabilitas data dijamin melalui penggunaan metode pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, serta dengan mengacu pada teori dan konsep yang terpercaya dalam studi hubungan internasional. Selain itu, analisis data yang dilakukan secara teliti dan objektif juga membantu meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

Peran dan Tantangan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dalam Mengimplementasikan Soft Diplomacy Australia

Hal yang secara fundamental menjadi dasar pelaksanaan politik luar negeri Australia adalah didasarkan pada pandangan akan pentingnya memiliki kemampuan dalam menavigasi dunia yang penuh perubahan dinamis dan ketidakpastian. Di atas fondasi nilai-nilai ini Australia membangun keterlibatan internasionalnya. Australia tidak mendefinisikan identitas nasionalnya berdasarkan ras atau agama, tetapi berdasarkan nilai-nilai bersama, termasuk kebebasan politik, ekonomi dan agama, demokrasi liberal, supremasi hukum, kesetaraan ras dan gender, serta saling menghormati (Australian Government, 2017b).

Kemampuan Australia untuk memengaruhi negara dan publik asing ini, ditopang oleh beberapa nilai yang merepresentasikan Australia yaitu demokrasi, masyarakat multikultural, ekonomi yang kuat, gaya hidup yang menarik (*attractive lifestyle*), dan institusi berkelas dunia (*world-class institutions*).

Pelaksanaan *soft diplomacy* Australia dikoordinasikan di bawah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*) yang menghabiskan sekitar AUD 4,4 miliar per tahun untuk pengembangan dan penyampaian kegiatan-kegiatan diplomasi publiknya (Wise, 2022). Australia juga secara aktif mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya melalui 91 misi diplomatik dengan didukung oleh sebanyak 542 diplomat Australia yang ditempatkan di luar negeri di seluruh dunia. Sebagai contoh, Kedutaan Besar Australia (*Australian Embassy*) di Jakarta merupakan misi luar negeri terbesar Australia dengan didukung fakta bahwa terdapat lebih banyak diplomat Australia yang mahir berbahasa Indonesia daripada bahasa lain selain bahasa Prancis, yang merupakan bahasa diplomasi internasional yang diakui (Australian Government, 2019).

Dalam menjalankan perannya terkait diplomasi publik Australia, DFAT juga dilengkapi dengan beberapa departemen, dimana yang paling utama adalah Images of Australia Branch (IAB) yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan program diplomasi publik dan budaya Australia dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan politik luar negeri serta meningkatkan nilai perdagangan Australia. Program-program di bawah IAB bertujuan untuk menciptakan persepsi positif terhadap Australia dan untuk memastikan bahwa citra internasional Australia adalah kontemporer, dinamis dan positif (*contemporary, dynamic and positive*). Di antara program yang dikelola oleh IAB adalah terkait dialog lintas budaya dan lintas agama yang

biasanya dilakukan melalui program pertukaran tokoh pemuda (Parliament of Australia, 2019).

Departemen yang berada di bawah DFAT juga terhubung dan bekerja sama dengan sembilan yayasan, dewan dan institut bilateral (*Foundations, Councils and Institutes/FCIs*). FCI bertanggung-jawab untuk mempromosikan hubungan antar-warga dan citra kontemporer Australia yang akurat dalam upaya mendukung pencapaian tujuan politik luar negeri dan perdagangan pemerintah Australia. Kesembilan FCI ini beroperasi baik di dalam Australia maupun di luar negeri untuk menumbuhkan persepsi tentang Australia kontemporer sebagai negara yang maju secara ilmiah, teknologi dan pendidikan, giat secara ekonomi, serta beragam secara budaya. Kegiatan FCI secara khusus ditujukan untuk membangun jaringan dan kontak, mempengaruhi pembuat opini dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan (Parliament of Australia, 2019a).

FCI pertama yang dibentuk oleh pemerintah Australia adalah *Australia-Japan Foundation* yang dibentuk sebagai sebuah badan hukum di bawah *Australia-Japan Foundation Act 1976*. Selanjutnya, berturut-turut dibentuk FCI: *Australia-China Council*, *Australia-India Council*, *Australia-Indonesia Institute*, *Australia-Korea Foundation*, *Council on Australia-Latin America Relations*, *Council for Australian-Arab Relations*, *Australia-Malaysia Institute* dan *Australia-Thailand Institute* (Australian Government, 2018).

Dalam perjalanannya, DFAT dan FCI, dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya koherensi secara keseluruhan mengenai inti tujuan diplomasi Australia. Akibatnya, banyak upaya diplomasi publik Australia yang tampak reaksioner, terpecah-pecah, atau tidak tersentuh dan tidak selaras dengan pencapaian kepentingan nasional Australia. Tantangan kedua adalah kurangnya keterlibatan audiens domestik Australia dalam diskusi-diskusi terkait politik luar negeri, sementara politik luar negeri merupakan kajian intermestik yang menuntut adanya kesadaran dan keterlibatan domestik, sekaligus mempertimbangkan situasi internasional. Faktor intermestik ini akan berimplikasi pada diplomasi Australia, sehingga terdapat kebutuhan yang mencolok bagi adanya diskusi yang lebih luas dan lebih inklusif terkait kepentingan nasional Australia dan prioritas diplomatik di dalam negeri (Parliament of Australia, 2019b).

Diplomasi publik Australia melibatkan publik domestik dalam memahami dan menginformasikan persepsi publik terkait kebijakan luar negeri, sekaligus membangun

minat dan mengkonsolidasikan dukungan pada praktik diplomasi, serta untuk memperjelas substansi dan arah kepentingan nasional Australia. Ini menjadi tantangan penting bagi DFAT karena tanpa hal ini Australia berisiko mengalami inkoherensi dalam praktik diplomasi yang juga akan berimplikasi pada semakin tidak terkoneksi antara tujuan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Kondisi ini pada akhirnya akan berimplikasi pada pencapaian reputasi internasional, *soft power*, dan pengaruh diplomatik Australia (Byrne, 2016). Tantangan terakhir adalah terkait sumber daya dalam menjalankan fungsi diplomatik Australia yang dipandang sudah terlalu lama menanggung beban pemotongan anggaran. Dalam konteks ini, pendanaan berkelanjutan dan langkah-langkah kreatif yang mendukung pengembangan diplomasi publik akan membantu dalam upaya memajukan kepentingan multidimensi Australia di luar negeri secara akurat dan efektif (Byrne, 2016).

People to People Diplomacy sebagai Pilar Diplomasi Publik Australia

Diplomasi publik Australia didasari oleh upaya pemerintah Australia untuk bekerja lebih keras dalam memproyeksikan citra Australia yang kuat dan unik ke seluruh dunia. Diplomasi publik yang dijalankan Australia melalui diplomasi budaya, beasiswa pendidikan, dialog dan pertukaran, serta media diharapkan akan menjadi alat yang penting dalam memproyeksikan citra Australia yang dinamis, terbuka dan tetangga yang berharga (*valuable neighbour*) bagi negara-negara tetangganya di kawasan Indo-Pasifik (Byrne, 2009). Dalam hal ini, pemerintah Australia melalui DFAT memiliki perspektif optimis dan terbuka dengan melakukan peningkatan hubungan orang-ke-orang (*people-to-people relations*) sebagai strategi diplomasi publik yang diadaptasi oleh Australia. Strategi diplomasi publik ini juga bertujuan untuk menekankan keterlibatan Australia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

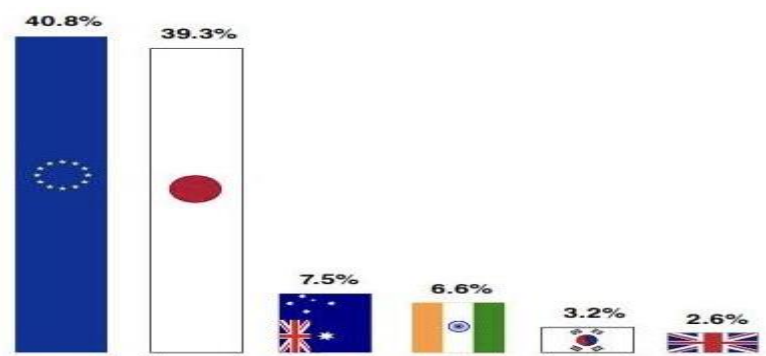
Secara khusus, tujuan dari strategi diplomasi publik Australia melalui DFAT dinyatakan dalam empat kerangka besar (Australian Government, 2017b). Pertama, mempromosikan Australia sebagai lingkungan investasi yang kompetitif, ekonomi yang terbuka dan tangguh, berkomitmen terhadap liberalisasi perdagangan, peluang investasi pariwisata, pendidikan dan pelatihan yang kuat, serta keunggulan dalam inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, membangun pemahaman tentang peran dan komitmen Australia di kawasan Indo-Pasifik – termasuk integrasi yang lebih dalam,

pembangunan berkelanjutan, dan kesetaraan gender. Ketiga, memperkuat pengaruh Australia dalam membentuk arsitektur politik dan keamanan internasional dengan cara-cara yang memajukan kepentingan nasional, sekaligus menopang kemakmuran dan keamanan di kawasan. Keempat, menjadi sarana promosi bagi Australia sebagai negara kontemporer, kreatif, sukses, toleran dan beragam; tempat yang memiliki daya tarik untuk belajar, bekerja, berkunjung, tinggal, sekaligus melakukan investasi (Australian Government, 2017b).

Australia bukan hanya mengkonsepsikan diri sebagai negara berukuran sedang (*medium-sized country*) yang bersaing dengan banyak negara lainnya untuk mencapai posisi penting di panggung global, tetapi juga memiliki kelemahan karena secara geografis terpisah dari negara lain. Posisi Australia yang “terisolasi” dipandang menimbulkan kesulitan yang lain, yaitu jarak geografis Australia dari pusat dunia membuat diplomasi publik bahkan menjadi lebih penting. Mengingat pentingnya kawasan Asia untuk Australia, baik secara strategis, ekonomi dan politik, maka dipercaya bahwa diplomasi publik di kawasan ini merupakan yang paling strategis sekaligus menjadi investasi logis untuk Australia, sehingga harus menjadi prioritas yang teratas dalam diplomasi publik Australia (Australian Government, 2017b).

Hanya saja, Australia memang tidak dipandang sebagai negara yang sangat berpengaruh di Asia. Selama bertahun-tahun citra negara Australia adalah sebuah tempat yang aman dan santai (*a safe and relaxing place*) dengan penggambaran sebagai negara yang ber-matahari cerah, pantai yang luas dan keajaiban alam yang belum terjamah. Dalam laporan survei *The State of Southeast Asia* tahun 2021, mengungkapkan beberapa fakta terkait pandangan responden dari negara-negara ASEAN terhadap Australia, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar diagram 1 dan 2 berikut:

Gambar 1 – Negara Mitra Strategis Pilihan dan Terpercaya bagi ASEAN



Sumber: *The State of Southeast Asia, Survey Report 2021*, ASEAN Studies Centre, ISEAS Yusof Ishak Institute, h. 34.

Dari gambar diagram 1 dapat dijelaskan bahwa Australia hanya didukung oleh 7,5% responden dari negara-negara ASEAN yang memilih Australia sebagai mitra strategis pilihan dan terpercaya bagi ASEAN, sementara Uni Eropa menempati posisi pertama yang dipilih oleh 40,8% responden, dan China di posisi kedua dengan dukungan 39,3% responden.

Gambar 2 – Negara yang menjadi Destinasi Utama Wisata

Country	An ASEAN member state	Australia	China	India	EU	Japan	Republic of Korea	New Zealand	The United Kingdom	The United States
ASEAN	12.2%	5.6%	2.9%	1.0%	23.3%	30.2%	4.7%	9.8%	4.9%	5.4%
Brunei	9.1%	3.0%	0.0%	3.0%	9.1%	27.3%	12.1%	6.1%	21.2%	9.1%
Cambodia	23.1%	0.0%	0.0%	0.0%	46.2%	23.1%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%
Indonesia	14.0%	5.4%	0.8%	0.8%	30.2%	25.6%	6.2%	10.9%	2.3%	3.9%
Laos	2.5%	5.0%	2.5%	0.0%	25.0%	35.0%	0.0%	20.0%	0.0%	10.0%
Malaysia	14.5%	5.1%	4.3%	4.3%	13.7%	23.1%	6.8%	14.5%	7.7%	6.0%
Myanmar	12.8%	6.4%	1.9%	0.6%	24.4%	28.2%	3.2%	12.8%	2.6%	7.1%
Philippines	14.9%	1.5%	0.0%	0.0%	22.4%	38.8%	7.5%	6.0%	3.0%	6.0%
Singapore	13.9%	7.6%	4.4%	0.0%	17.7%	36.1%	4.4%	5.7%	8.9%	1.3%
Thailand	7.6%	3.1%	3.1%	0.8%	24.4%	40.5%	2.3%	8.4%	3.8%	6.1%
Vietnam	10.9%	8.6%	5.1%	0.6%	26.9%	24.6%	4.6%	8.0%	4.0%	6.9%

Sumber: *The State of Southeast Asia, Survey Report 2021*, ASEAN Studies Centre, ISEAS Yusof Ishak Institute, h. 54.

Sementara dari gambar diagram 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa negara atau wilayah yang menjadi preferensi utama warga ASEAN sebagai tujuan wisata adalah Jepang (30,2%), Uni Eropa (23,3%), dan salah satu negara ASEAN (12,2%). Sementara Australia hanya memperoleh dukungan responden sebesar 5,6%, dimana fakta ini sekaligus memposisikan Australia berada di bawah Selandia Baru. Hasil survei ini menunjukkan dampak dan hasil yang terbatas dari upaya pengaruh *soft power* Australia di kawasan ASEAN, dimana hal ini menandakan perlunya penilaian ulang strategis dari pelaksanaan diplomasi Australia.

Dengan kata lain, kedua survei di atas menunjukkan bahwa meskipun selama bertahun-tahun, citra negara Australia telah dijaga dengan baik dan telah berhasil dalam beberapa konteks, tetapi tampaknya efeknya tidak begitu kuat di kawasan ASEAN. Perluasan diplomasi Australia ke kawasan ASEAN merupakan bagian penting dari upaya

untuk memperkuat hubungan regional, meningkatkan kerja sama ekonomi, dan mempromosikan stabilitas dan keamanan. Namun, jika hasil survei menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak memberikan dampak yang diharapkan, hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali strategi diplomasi Australia.

Australia melalui DFAT terus berupaya untuk mencapai tujuan dari strategi diplomasi publiknya, dimana DFAT mengutamakan untuk membina hubungan orang-ke-orang (*people-to-people relations*) dan hubungan kelembagaan yang langgeng di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil. Secara jelas dinyatakan bahwa DFAT akan berupaya untuk mengejar tujuan dan sasaran diplomasi publik ini melalui pendekatan yang melibatkan audiens di Australia sekaligus akan memfasilitasi jaringan, kolaborasi, dan hubungan antara orang dan lembaga dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan pengaruh yang pada akhirnya akan memajukan kepentingan nasional Australia.

Pemerintah Australia juga dengan jelas menyatakan adanya hubungan antara reputasi internasional Australia dengan kemampuannya untuk memengaruhi agenda regional dan global. Terdapat dua elemen utama yang dipandang dapat berkontribusi sekaligus menjadi strategi efektif dalam menjawab tantangan diplomasi publik Australia. Pertama, pentingnya menyusun dan menyampaikan pesan yang dapat diterima dan dipahami audiens dengan baik. Kedua, diplomasi publik yang efektif bergantung pada hubungan antar masyarakat yang kuat dan langgeng (Australian Government, 2017). Dalam konteks ini, elemen utama dari *soft diplomacy* yang digunakan oleh Australia adalah melalui diplomasi budaya (*cultural diplomacy*), diplomasi pendidikan (*education diplomacy*) dalam bentuk beasiswa pendidikan, dan diplomasi media (*media diplomacy*) (Medcalf, 2019).

Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Budaya (Cultural Diplomacy)

Sejak -1970-an, badan-badan khusus dibentuk oleh pemerintah Australia yang ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan hubungan budaya dengan negara-negara tertentu. Badan-badan tersebut di antaranya adalah *Australia-Japan Foundation* (didirikan pada 1976), *Australia-China Council* (1978), *Australia-Indonesia Institute* (1989) dan *Australia-Korea Foundation* (1992). Meskipun diselenggarakan secara terpusat oleh DFAT, tetapi badan-badan bilateral ini juga beroperasi secara mandiri dan bertujuan untuk membangun strategi keterlibatan jangka panjang melalui program seni dan

pendidikan. Pada saat yang sama dengan pendirian badan-badan tersebut, DFAT juga menyelenggarakan program tahunan “fokus negara” (*“country focus”*) yang bertujuan untuk menampilkan budaya Australia di negara-negara yang ditetapkan melalui Dewan Kebudayaan Internasional Australia (*the Australia International Cultural Council/AICC*). Meskipun AICC kemudian dihapuskan pada tahun 2014 karena terkait adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah Australia, tetapi DFAT secara konsisten bekerja sama dengan lembaga lain dalam menjalankan misinya yang berkaitan dengan promosi ekspor budaya Australia, misalnya melalui pariwisata, layanan pendidikan, kegiatan acara olahraga besar, dan penyelenggaraan acara diplomatik seperti pertemuan G20 yang diadakan di Brisbane pada November 2014 (Ang et al., 2015). Semua ini merupakan upaya diplomasi publik sekaligus diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) yang ditempuh Australia dalam meningkatkan kepentingan ekonomi nasional sekaligus mempromosikan *soft power* Australia, meskipun dalam kenyataannya, belum memberikan hasil optimal dalam pencapaian keberhasilan *soft diplomacy* Australia (Medcalf, 2019).

Diplomasi publik melalui berbagai pendanaan kegiatan seni dan budaya yang dijalankan oleh DFAT bekerja sama dengan Kementerian Kesenian (*the Ministry for the Arts*), Dewan Seni Australia (*the Australia Council for the Arts*) dan kelembagaan-kelembagaan terkait ini, bertujuan untuk memperkuat reputasi Australia sebagai negara yang maju dan kreatif, percaya diri dan berwawasan ke luar di sektor seni. Dalam hal ini, DFAT juga memanfaatkan industri kreatif Australia, termasuk mode, desain, dan arsitektur, yang sejalan dengan agenda diplomasi ekonomi dan inovasi pemerintah serta prioritas bantuan pembangunan.

Melalui pendanaan kegiatan seni dan budaya di negara dan kawasan Indo-Pasifik, diplomasi publik Australia secara khusus ditujukan untuk membangun jaringan dan mempromosikan kolaborasi dan pertukaran antara seniman/organisasi seni Australia dan mitra internasional, memperluas audiens dan pasar untuk karya seni dan produk kreatif Australia, mempromosikan kepakaran Australia dalam produksi dan manajemen seni, memanfaatkan kemitraan publik dan swasta, yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi tentang Australia di dalam dan luar negeri.

Dalam upaya mendukung tercapainya kemajuan bagi industri kreatif Australia yang diwujudkan dengan memperkuat keterlibatan dan peningkatan hubungan orang-ke-orang

di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus menekankan pentingnya keberadaan ekonomi yang bersifat kreatif bagi Australia, maka pada tahun 2021 DFAT telah menggelar Program Hibah Diplomasi Kebudayaan Australia (*Australian Cultural Diplomacy Grants Program /ACDGP*). Penyelenggaraan program ini difokuskan pada upaya promosi industri kreatif dan budaya Australia dalam skala internasional. Melalui ACDGP, pemerintah Australia memberikan pendanaan bagi berbagai proyek yang diharapkan mampu menciptakan pandangan tentang Australia yang kontemporer dan positif. Hubungan yang terjalin melalui pendanaan berbagai proyek tersebut juga pada akhirnya ditujukan untuk dapat meningkatkan keterlibatan (*engagement*) orang-ke-orang di kawasan Indo-Pasifik dan kawasan lainnya (Evelynd, 2021).

Setiap tahunnya, melalui ACDGP, Pemerintah Australia mengalokasikan total \$442,000, dengan perincian jumlah hibah minimum adalah \$10,000 dan jumlah hibah maksimum adalah \$60,000. Jangka waktu hibah yang diberikan hingga maksimal tiga tahun. Meskipun demikian, kandidat yang berhak untuk mengikuti ACDGP harus merupakan warga negara Australia, penduduk tetap Australia atau organisasi Australia. Hal ini dikarenakan ACDGP bertujuan untuk mempromosikan dan menyebarkan kesadaran akan aset seni dan budaya Australia secara internasional (Australian Government, 2023).

Pilar kedua dari *soft diplomacy* Australia melalui diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) adalah Komunitas Diaspora (*Diaspora Communities*), dimana Australia memiliki populasi imigran kelahiran Asia yang besar yang menjadi keunggulan komparatif penting dalam diplomasi diaspora di kawasan Indo-Pasifik. Australia juga memiliki sekitar 1 juta warga Australia yang bermukim di berbagai negara dengan konsentrasi terbesar di Inggris, Eropa, Amerika Utara, dan Selandia Baru (Rosser, 2021b). Diplomasi diaspora Australia dinyatakan mencakup diplomasi publik di dalam negeri (*public diplomacy at home*) yang ditempuh melalui penjangkauan kepada komunitas diaspora di Australia, serta diplomasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh bisnis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Australia yang beroperasi di luar negeri.

Australia dipandang perlu mengadopsi sejumlah kebijakan diaspora (*diaspora policy*) yang akan menguntungkan bagi Australia (Rosser, 2021b). Beberapa hal yang melandasi argumentasi ini di antaranya adanya fakta bahwa Australia memiliki jumlah

diaspora yang cukup besar, berbakat, dan menetap di tempat yang strategis. Tercatat lebih dari satu juta orang Australia yang bertempat tinggal di luar negeri – setidaknya sebelum COVID-19 – dengan jumlah terbanyak, menetap di Asia. Komunitas diaspora ini juga memiliki pengetahuan dan jaringan yang dapat membantu mempromosikan perdagangan bilateral, memfasilitasi investasi asing langsung, dan merangsang inovasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Secara khusus, keberadaan diaspora ini bahkan dapat membantu perkembangan bisnis Australia di Asia (Rosser, 2021b).

Kebijakan diaspora (*diaspora policy*) juga akan memberikan kerangka kerja strategis tentang bagaimana Australia terlibat dengan diasporanya. Adanya fakta bahwa selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan sebagian besar diaspora Australia kembali ke Australia, justru membuat kebijakan diaspora ini menjadi lebih penting. Hal ini dikarenakan Australia dipandang perlu menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru pasca pandemi, dimana Asia dipengaruhi dengan cukup besar (Rosser, 2021b).

Kebijakan diaspora (*diaspora policy*) Australia ini mengalami tantangan utama, yaitu adanya pandangan bahwa Australia tidak memiliki hubungan khusus dengan diasporanya. Diaspora Australia sebagian besar terdiri dari emigran generasi pertama sejak pertengahan 1980-an, yang dalam hal ini kontras dengan diaspora negara-negara seperti Irlandia, Israel dan China yang memiliki sejarah yang lebih panjang dan sangat bergantung pada hubungan leluhur dalam mengklaim jumlah dan afinitas budaya. Diaspora Australia secara ekonomi tidak penting bagi Australia seperti halnya diaspora negara-negara yang sangat bergantung pada pengiriman uang ke negara-negara tersebut. Diaspora Australia juga kecil secara absolut dan relatif terhadap ukuran populasi. Kurangnya hubungan khusus dengan diaspora ini semakin mempersulit upaya keterlibatan diaspora dalam agenda kebijakan pemerintah Australia (Rosser, 2021a).

Pilar ketiga dari *soft diplomacy* Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan instrumen diplomasi budaya (*cultural diplomacy*) adalah melalui program pengajaran bahasa-bahasa Asia di sekolah-sekolah di Australia. Tanpa kemampuan bahasa dan kemampuan antar-budaya, Australia dipandang akan kesulitan untuk mengarahkan hubungannya dengan beberapa negara pemain utama di Asia, misalnya Indonesia, China, dan Malaysia. Australia kemudian membangun investasi dalam pengajaran bahasa-bahasa Asia, sehingga generasi muda Australia dapat mengenal negara tetangganya, yang pada gilirannya diharapkan akan memudahkan upaya Australia untuk

mengenalkan bahasa Inggris dan budaya Australia di negara-negara tersebut (Curry, 2021a).

Secara historis, Australia telah menjadi negara yang memiliki fokus dalam pengajaran beberapa bahasa Asia, meskipun kemudian mengalami penurunan kuantitas dan kualitas pengajaran di tingkat sekolah menengah selama 15 tahun terakhir. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2013, yaitu dengan berakhirnya program yang dijalankan *National Asian Languages and Studies in Schools Program* (NALSSP) selama 2008 hingga 2012, dimana pendidikan di Australia mengalami periode penurunan dalam hal pengembangan profesional, dukungan kebijakan, dan pendanaan pengajaran bahasa-bahasa Asia (Curry, 2021b).

Universitas-universitas di Australia juga menjadi aktor institusional yang vital dalam hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya. Ini ditandai dengan setiap tahunnya, universitas-universitas Australia menyambut ribuan mahasiswa dari kawasan Indo-Pasifik untuk menempuh pendidikan di berbagai program. Salah satu hal yang juga menjadi kontribusi besar dari universitas-universitas di Australia adalah dengan menawarkan program studi bahasa-bahasa Asia. Program-program ini memungkinkan siswa Australia untuk mengembangkan keterampilan berbagai bahasa Asia tingkat lanjut. Kurangnya insentif dari pemerintah Australia, sejalan dengan tekanan ekonomi yang dihadapi universitas akibat COVID-19 yang berimbas pada berkurangnya sumber pendanaan dari siswa internasional, mendorong banyak universitas di Australia, misalnya *La Trobe University* dan *Western Sydney University*, untuk melakukan penutupan pada berbagai program studi bahasa Asia. Dalam hal ini, kritik utama yang mengemuka adalah kurangnya kepekaan dari pihak pemerintah Australia dalam mengupayakan agar universitas tidak menutup program bahasa yang vital, serta memastikan dipertahankannya keterikatan budaya dengan negara-negara Asia (Crouch, 2021).

Terdapat pula pandangan bahwa aspek inti dalam membina hubungan dekat dengan negara lain justru terletak pada kapabilitas warga Australia, khususnya dalam hal pemahaman dan keterlibatan dengan bahasa dan budaya masyarakatnya. Ketika sebuah universitas menutup program bahasanya, ini berarti pemerintah mengabaikan peran penting yang dipegang universitas secara institusional dalam mempromosikan keterlibatan mendalam dengan negara tersebut. Universitas Australia akan melepaskan aset budaya dan akademik yang sangat penting dengan penutupan berbagai program studi

bahasa Asia ini dan akan berdampak dalam kebijakan jangka panjang Australia. Hal ini dikarenakan, universitas berkontribusi membangun profil mereka di kawasan Indo-Pasifik melalui kepakaran para akademisi yang meneliti dan mengajar tentang masyarakat, ekonomi, sejarah, dan budaya yang ada di berbagai negara Asia. Di lain pihak, lulusan dari universitas Australia yang mempelajari kebudayaan dan berbagai bahasa Asia akan menjadi duta budaya, sosial, dan ekonomi terbaik milik Australia di masa depan, khususnya dalam menghadapi negara-negara Asia tersebut. Dengan demikian, kekhawatiran terbesar terkait pengurangan pendanaan dan penutupan program pengajaran bahasa-bahasa Asia di sekolah dan universitas Australia adalah pandangan bahwa tanpa keterampilan bahasa, pengetahuan, dan kemampuan antar-budaya, maka Australia harus berjuang keras dalam menavigasi hubungannya dengan negara-negara Asia tersebut.

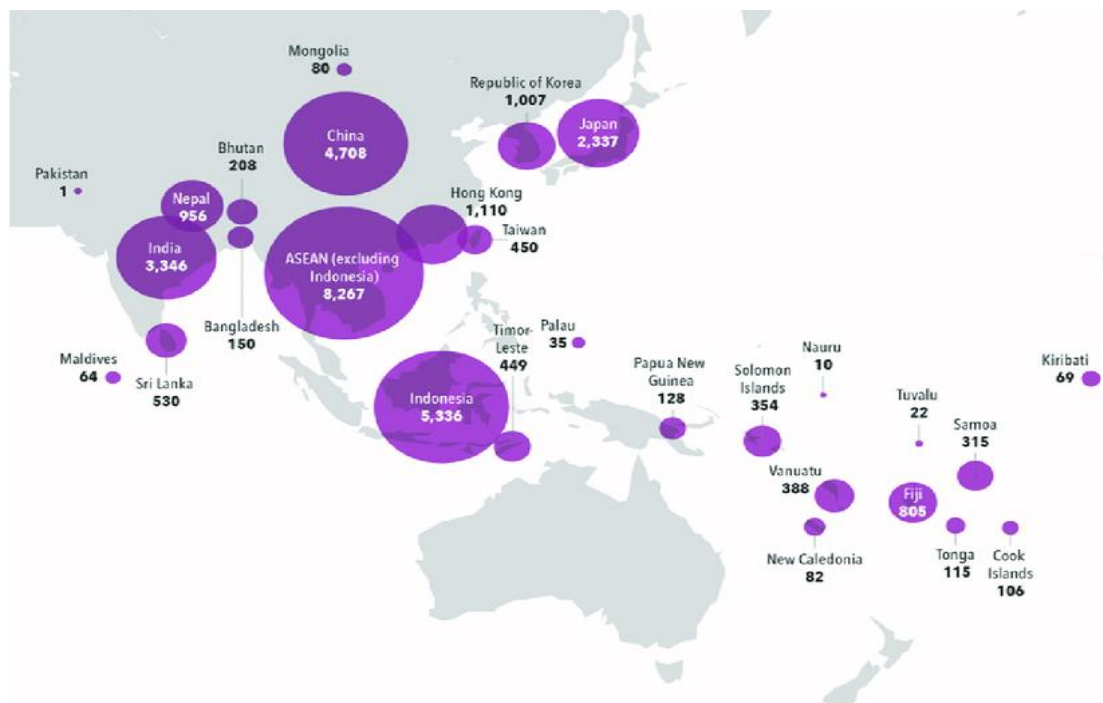
Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Pendidikan (Education Diplomacy)

Australia secara aktif menggunakan diplomasi pendidikan (*education diplomacy*) sebagai salah satu bentuk dari *soft diplomacy* untuk mempromosikan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia. Dua di antara instrumen *soft diplomacy* yang digunakan Australia tersebut adalah *New Colombo Plan* (NCP) dan *Australia Awards*. NCP merupakan inisiatif pemerintah Australia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kawasan Indo-Pasifik di kalangan kaum muda Australia, yaitu dengan jalan mendukung mahasiswa Australia sehingga dapat menempuh studi serta mengikuti program magang di kawasan tersebut selama tiga hingga sembilan belas bulan. NCP bertujuan secara transformasional untuk memperdalam hubungan Australia di kawasan Indo-Pasifik, baik di tingkat individu maupun melalui perluasan kerja sama universitas, bisnis, dan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya (Gabriela Soehandoko, 2023).

NCP juga merupakan salah satu agenda utama dari kebijakan luar negeri pemerintah Australia, yang berupaya memanfaatkan mobilitas mahasiswa sebagai diplomasi publik untuk meningkatkan posisi dan pengaruh Australia di kawasan Indo-Pasifik. Program ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran yang lebih di kalangan warga Australia terhadap kawasan untuk masa depan sekaligus mendukung arus siswa secara dua arah yang berasal dari kawasan ini, yaitu bersama-sama dengan keberadaan

ribuan siswa yang datang ke Australia untuk belajar setiap tahunnya. Seiring waktu, jaringan alumni NCP akan memantapkan dirinya sebagai kelompok berpengaruh dengan pengalaman yang didapat secara langsung untuk hidup, belajar dan bekerja di kawasan tersebut. Komunitas bisnis Australia dan banyak perusahaan asing merupakan mitra penting pemerintah Australia dalam penyelenggaraan NCP, termasuk dengan menyediakan kesempatan magang bagi peserta NCP (Byrne et al., 2016). Adapun negara-negara yang menjadi tujuan NCP sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3 – Persebaran Negara yang Menjadi Tujuan Siswa *New Colombo Plan* (2014-2018)



Sumber: Australian Government, 2017 Foreign Policy White Paper, h. 113.

Gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Australia telah mendukung lebih dari 30.000 mahasiswa dan sarjana Australia untuk belajar dan melakukan magang di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini, komunitas bisnis Australia dan banyak perusahaan asing menjadi mitra penting, termasuk dengan menyediakan program magang. Dengan memberikan dukungan kepada generasi muda Australia untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait budaya, lingkungan bisnis, dan masyarakat Indo-Pasifik, ini merupakan upaya Australia untuk memperkuat ikatan dan

keterhubungan di masa depan, bukan hanya di level antar negara tetapi juga antar berbagai komunitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik (Gabriela Soehandoko, 2023).

Sementara secara umum, pada putaran Program Mobilitas 2020 (*Mobility Program 2020*), NCP telah memberikan dukungan kepada lebih dari 11.196 mahasiswa yang berasal dari 40 universitas di Australia untuk dapat berpartisipasi dalam 685 proyek yang tersebar di 36 lokasi di seluruh Indo-Pasifik. Hal ini menjadikan jumlah siswa yang menjadi penerima beasiswa NCP dan hibah mobilitas sejak tahun 2014 bertambah menjadi 60.000 orang, yang sekaligus menunjukkan komitmen dari pemerintah Australia dalam upaya membangun saling pengertian dan kemitraan di kawasan ini (Australian Embassy Indonesia, 2019).

Pemerintah Australia tidak hanya memposisikan NCP sebagai alat diplomasi publik yang strategis untuk membangun hubungan yang langgeng dengan negara-negara Indo-Pasifik, tetapi negara-negara penerima juga memandang NCP sebagai katalis yang memfasilitasi pelaksanaan agenda internasional mereka. Dalam hal ini, terdapat empat bentuk utama dampak sosial yang terkait dengan pembelajaran siswa Australia di luar negeri di Indo-Pasifik, yang dirasakan oleh masyarakat tuan rumah, yaitu (a) memperkuat hubungan bilateral dan internasional; (b) membina kemitraan mahasiswa-ke-mahasiswa, universitas-ke-industri, dan universitas-ke-universitas; (c) memperkuat keterlibatan masyarakat melalui layanan-belajar (*service-learning*); dan (d) memperkaya kapasitas yang dimiliki tuan rumah dalam hal sumber daya manusia dan kesadaran akan nilai-nilai mereka sendiri (Australian Embassy Indonesia, 2019).

Di lain sisi, *Australia Awards* merupakan beasiswa internasional bergengsi yang telah memberikan kesempatan kepada banyak pemimpin muda untuk melakukan studi di tingkat sarjana atau pascasarjana secara penuh waktu di institusi tersier Australia. Terdapat juga *Australia Awards Fellowships* yang menawarkan kesempatan kepada para profesional karir di tingkat menengah untuk menempuh studi secara singkat, melakukan penelitian maupun pengembangan profesional lainnya di Australia. *Australia Awards* sendiri didanai oleh pemerintah Australia dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terkait kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang bagi negara-negara mitra Australia, dimana hal ini sejalan dengan perjanjian bilateral, regional, dan global. Dalam hal ini, *Australia Awards* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Australia yang menyatukan semua beasiswa yang dikelola oleh DFAT, Departemen Pendidikan dan

Pelatihan (*the Department of Education and Training*), dan Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (*the Australian Centre for International Agricultural Research/ACIAR*).

Keberadaan *Australia Awards* ini akan diselenggarakan dengan tujuan diplomasi publik Australia, yaitu mendorong keterikatan dengan lembaga budaya, olahraga, inovasi, sains dan penelitian, di samping juga ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan yang lebih luas. *Australia Awards* juga berupaya untuk merangsang perubahan yang langgeng dan meningkatkan potensi kepemimpinan dengan cara mengembangkan pemberdayaan jaringan global di antara individu yang berbakat, yang didapat melalui pengalaman pendidikan yang berkualitas tinggi di Australia. Para alumni *Australia Awards* diharapkan akan pulang ke negaranya dengan membawa pengetahuan dan ide-ide baru, serta kapasitas untuk berkontribusi secara nyata bagi negara asal mereka, yaitu sebagai pemimpin dalam bidangnya masing-masing. *Australia Awards* ini juga menjadi bukti nyata komitmen Australia untuk memberikan kesempatan dan peluang pendidikan dalam upaya merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di negara-negara berkembang. Bersama dengan NCP, *Australia Awards* menciptakan pertukaran dua arah yang sangat penting bagi keterlibatan Australia dengan kawasan Indo-Pasifik (Australian Embassy Indonesia, 2019).

Secara spesifik, *Australia Awards* juga dimaksudkan untuk membangun dan memperluas jaringan pemimpin, pendukung, dan pembuat perubahan global yang terlibat serta berpengaruh, sekaligus memaksimalkan jaringan “duta Australia” (*“Australian ambassador”*) di seluruh dunia yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas Australia dan pengembangan hubungan antar orang-ke-orang di antara Australia, negara tetangga regionalnya, dan komunitas internasional yang lebih luas (Australian Government, 2019). Adanya pergeseran dari waktu ke waktu terkait peran Australia dalam lanskap beasiswa, kemudian ikut menjadikan keterlibatan dengan alumni *Australia Awards* menjadi semakin penting.

Meskipun demikian, tidak adanya asosiasi alumni *Australia Awards* yang dikelola secara terpusat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Australia terutama dalam menemukan peluang dan informasi terkait alumni *Australia Awards* yang tersebar luas di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Hampir semua alumni menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Australia, namun sebagian besar menyatakan perlunya suatu tujuan yang

konkrit untuk mendukung konektivitas yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, diplomasi publik Australia menjadi kurang efektif karena belum optimalnya upaya kolaborasi di antara alumni *Australia Awards* yang sebetulnya berpotensi untuk meningkatkan pengaruh *soft power* Australia (Australian Government, 2018).

Di lain sisi, keberadaan NCP yang telah memberikan kesempatan kepada ribuan orang Australia untuk belajar dan meningkatkan kesadaran terkait kawasan, juga tidak terlepas dari kritik karena skalanya dipandang terlalu terbatas dalam upayanya mendorong pemahaman berbasis luas terkait kawasan Indo-Pasifik. Isu-isu kunci terkait koherensi strategis, kemitraan, dan evaluasi memerlukan perhatian lebih lanjut jika NCP ditujukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan *soft power* Australia. Kritik terkait NCP juga menyatakan bahwa NCP yang ditujukan bagi “hanya sejumlah kecil” mahasiswa tidak akan membuat Australia menjadi masyarakat yang paham Asia secara komprehensif, meskipun di sisi lain tidak dapat diabaikan bahwa NCP merupakan salah satu instrumen *soft power* Australia yang berhasil. Dalam konteks ini, NCP dimaknai sebagai upaya Australia untuk menunjukkan komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik, yaitu dengan jalan mengirimkan pesan yang kuat bahwa mengirimkan orang-orang muda Australia untuk belajar secara langsung dari negara tetangganya merupakan sebuah tanda kerendahan hati. Hal ini sekaligus menunjukkan kesediaan untuk bersama-sama membentuk masa depan kawasan. Model diplomasi pertukaran (*exchange diplomacy*) yang termuat dalam NCP juga dipandang sebagai sebuah bentuk pertukaran positif yang akan bertahan dalam ingatan kedua belah pihak, memperkuat persepsi timbal balik yang menguntungkan, meningkatkan kepercayaan, sekaligus memperkuat nilai-nilai bersama.

Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Media (Media Diplomacy)

Pada 010, Lowy Institute mengeluarkan laporan temuannya dengan tajuk “Penyiaran Internasional dan Kontribusinya pada Diplomasi Publik” (“*International Broadcasting and its Contribution to Public Diplomacy*”), yang memberikan kesimpulan bahwa salah satu perangkat *soft power* pemerintah Australia dalam menjalankan diplomasi publik yang paling efisien dan efektif adalah melalui instrumen Penyiaran Publik Internasional (*International Public Broadcasting/IPB*). Namun pada tahun-tahun berikutnya, peran penyiaran publik internasional Australia telah berkurang sebagai akibat adanya ketidak-

konsistenan dan pengabaian pemerintah, pemotongan anggaran, dan ketidakprofesionalan manajemen Perusahaan Penyiaran Australia (*Australian Broadcasting Corporation/ABC*) (Lowy Institute for International Policy, 2017).

Dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 (*Australian Foreign Policy White Paper 2017*) dinyatakan pentingnya memanfaatkan *soft power* Australia dalam upaya meningkatkan pengaruh kekuatan dan keragaman koneksi Australia terhadap dunia internasional. Meskipun di dalam *White Paper* tersebut terdapat bab “Kemitraan dan *Soft Power*” (“*Partnerships and Soft Power*”), tetapi tidak terdapat pembahasan yang secara khusus didedikasikan untuk menegaskan pada peran *soft power* yang dimainkan oleh penyiaran publik internasional Australia, yaitu ABC. Ketidakhadiran pembahasan ini dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia merupakan yang pertama kali terjadi dalam kurun waktu lebih dari satu dekade dan hal ini mencerminkan semakin berkurangnya profil lembaga penyiaran publik internasional Australia sejak tahun 2010 (O’Keeffe & Greene, 2019).

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang serius dan signifikan. Hal ini berarti bahwa di tingkat pemerintah, layanan penyiaran publik internasional Australia tidak lagi diakui sebagai kontributor yang berharga bagi upaya peningkatan *soft power* Australia, sekaligus mengabaikan sejarah panjang dan terkemuka ABC dalam penyiaran ke wilayah Pasifik, yang justru diidentifikasi oleh pemerintah Australia sebagai prioritas geostrategis utamanya. Meskipun secara eksplisit pemerintah Australia menyatakan berupaya bersaing untuk mendapatkan pengaruh global dan regional, namun pemerintah Australia dipandang tidak mengambil langkah apapun terkait peran penyiaran publik internasional dalam mendukung citra dan reputasi Australia di luar negeri, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Penyiaran publik internasional Australia telah menjadi bagian penting dalam profil internasional Australia sejak 1939. Hal ini didukung oleh piagam pendirian ABC di bawah Undang-Undang yang menyatakan secara jelas peran ABC untuk menyiarkan program ke negara-negara di luar Australia yang ditujukan untuk mendorong kesadaran terkait Australia dan pemahaman internasional menyangkut sikap Australia dalam permasalahan dunia, sekaligus memungkinkan warga negara Australia yang tinggal atau bepergian ke luar Australia untuk memperoleh informasi terkait Australia (O’Keeffe & Greene, 2019).

Pada 2010, ABC sebagai lembaga penyiaran resmi Australia memasuki masa hampir satu dekade dalam kondisi stabilitas dan konsolidasi yang baik, hal ini terutama dipandang dari sisi pencapaian arah strategis dan adanya dukungan pendanaan dari pemerintah. Pendanaan untuk jaringan penyiaran Radio Australia berasal dari alokasi Departemen Komunikasi (*Department of Communications*) untuk ABC, sedangkan *Australia Network* sebagai badan penyiaran televisi yang dijalankan oleh ABC didanai oleh DFAT melalui mekanisme proses tender berkala.

Pada 2011, masa depan *Australia Network* tampak terjamin, dimana pemerintah Australia memberikan ABC kontrak selama 10 tahun senilai AUD 23 juta untuk menjalankan jaringan tersebut. Di bawah kontrak tersebut, ABC kemudian menggabungkan fungsi-fungsi utama *Australia Network* dan Radio Australia. Namun, dalam perjalanan anggaran pertamanya pada tahun 2014, pemerintahan PM Tony Abbott yang baru justru mengumumkan pembatalan kontrak. Hal ini menyebabkan sedikitnya 80 staf dari Divisi Internasional ABC harus diberhentikan, menuntut dilakukannya konfigurasi ulang dan *rebranding* layanan media internasional ABC dalam upaya menciptakan layanan *Australia Plus*, sekaligus berdampak pada pengurangan jumlah siaran bahasa. Pengurangan dan pemotongan anggaran ini juga berdampak besar pada layanan Radio Australia, dimana pukulan paling berat bagi Radio Australia terjadi pada tahun 2017 ketika manajemen ABC memutuskan untuk memotong layanan gelombang pendek ke Pasifik (Lowy Institute for International Policy, 2017).

Pada Desember 2016, layanan bahasa Khmer, Burma, Vietnam, dan Prancis kemudian dihentikan, meskipun dilakukan peningkatan fokus pada audiens China, Indonesia, dan Papua Nugini. Hal ini kemudian dikecam oleh beberapa pengamat sebagai pemusnahan layanan dan sebagai kesalah-pahaman mendasar terkait pentingnya kontinuitas siaran publik internasional Australia ke kawasan Pasifik. Pada Juli 2018, dilakukan lebih banyak lagi *re-branding* layanan internasional, diantaranya layanan digital televisi internasional yaitu *Australia Plus* berganti nama menjadi ABC Australia, sementara Radio Australia yang telah berhasil mempertahankan penyiarannya yang dikenal luas selama hampir 80 tahun kemudian berganti menjadi ABC Radio Australia (O'Keefe & Greene, 2019).

Dalam 2017-2018 pemerintah Australia menyediakan total pembiayaan sebesar AUD 865,5 juta dimana ABC mengeluarkan sekitar AUD 11 juta per tahun untuk layanan

internasionalnya dengan memfokuskan pada sekumpulan audiens yang menjadi target siarannya (Ton, 2023). Terdapat empat kelompok besar yang menjadi target utama siaran ABC, yaitu *influencer* terdidik di pasar utama Asia, yang meliputi China (dan diaspora China), Indonesia dan India. Papua Nugini dan khalayak yang lebih luas di Pasifik, warga negara Australia yang tinggal dan/atau bepergian ke luar negeri juga menjadi target utama siaran. Demikian halnya berbagai komunitas yang memiliki keberagaman secara bahasa dan budaya di Australia, khususnya mereka yang memiliki koneksi ke pasar juga menjadi sasaran utama siaran ABC di kawasan Indo-Pasifik (Ton, 2023).

Dengan dilakukannya pemotongan anggaran pendanaan untuk penyiaran publik internasional, maka kemampuan ABC untuk secara efektif memenuhi harapan dan tuntutan dalam hal pencapaian target audiens, penyiaran program yang relevan, tepat waktu, dan kredibel, menghadapi tantangan. Karena terbatasnya dana yang tersedia untuk penyiaran program khusus yang relevan dengan negara dan bahasa tertentu, maka ABC hanya memiliki pilihan untuk menyiarkan ulang konten yang dibuat bagi pemirsa Australia. Hal ini menyebabkan kurang relevannya program yang disiarkan dengan minat dua audiens utama, yaitu *influencer* di Asia dan masyarakat Papua Nugini dan Pasifik (Kremmer, 2014).

Keputusan ABC untuk membatalkan layanan gelombang pendek domestik ke bagian-bagian terpencil Australia serta layanan internasional ke negara-negara terdekat, juga memicu perdebatan baru. Perdebatan ini juga dipicu oleh perluasan layanan penyiaran China ke negara-negara Pasifik, yang sebelumnya dianggap sebagai domain penyiaran Australia. Hilangnya siaran bahasa Radio Australia di sebagian besar wilayah, dikombinasikan dengan penghentian siaran gelombang pendek, telah menciptakan kekosongan yang siap diisi oleh China. Meskipun belum jelas apakah peningkatan kehadiran penyiaran China di Pasifik memberikan hasil yang efektif bagi China, namun ancaman pengambilalihan gelombang udara China di wilayah yang diidentifikasi Australia sebagai prioritas dalam Buku Putih 2017 telah membawa perdebatan ke tingkat urgensi. Ironisnya, hal ini terjadi justru pada saat Australia menyatakan akan memulai peningkatan peran Pasifiknya, dengan berinvestasi lebih banyak dalam diplomasi dan pembangunan di seluruh negara pulau-pulau kecil tersebut (McDougall, 2018).

Terkait hal ini, maka pemerintah Australia perlu membuat strategi baru menyangkut penyiaran publik internasional Australia dengan fokus yang jelas pada tujuan strategis

dan karakteristik geografis serta demografis dari audiens yang hendak dituju. Komitmen yang lebih kuat dan pendanaan jangka menengah juga sangat penting, dimana tanggung jawab keseluruhan terkait penyiaran publik internasional Australia harus terkoordinasi dengan baik di bawah DFAT. Dalam memperbarui komitmennya pada penyiaran publik internasional, pemerintah Australia juga harus memanfaatkan keahlian yang lebih luas dan melakukan serangkaian transformasi (Sharma, 2019).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum penyiaran publik internasional masih memiliki tempat penting di antara berbagai instrumen utama *soft power* Australia, tetapi fokus perdebatan perlu dialihkan kepada prioritas kepentingan nasional Australia. Di samping itu, mengingat pentingnya geostrategis yang dinyatakan Australia kepada Indo-Pasifik, maka kawasan ini harus menjadi prioritas bagi layanan berita yang kredibel, informatif, dan relevan yang terus berkembang secara dinamis. Penting pula untuk memastikan bahwa layanan media Australia yang secara resmi didanai oleh pemerintah Australia seperti Radio Australia dan ABC Australia menyediakan dengan hati-hati program yang tepat sasaran yang sesuai dengan publik di kawasan Indo-Pasifik.

Kelemahan Soft Diplomacy Australia di Kawasan Indo-Pasifik

Upaya *soft diplomacy* Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik yang ditempuh melalui diplomasi budaya, diplomasi pendidikan (NCP dan *Australia Awards*), serta media, dipandang belum memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan *soft power* Australia. Terkait hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai kelemahan dalam *soft diplomacy* Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik, yaitu menyangkut ketegangan diplomatik, persepsi Hiper-Pasifik, terlalu fokus pada isu keamanan, kritik terhadap kebijakan lingkungan, keterbatasan sumber daya, tidak konsisten dalam prioritas, kompleksitas dinamika regional, kurangnya koordinasi regional, dan persaingan pengaruh di kawasan (Widmaier, 2019).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Australia adalah terjadinya ketegangan diplomatik sebagai akibat dari kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah Australia, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi citra negara ini di kawasan Indo-Pasifik. Misalnya, hubungan Australia dengan China telah mengalami ketegangan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dimana hal ini dapat mengurangi daya tarik

soft diplomacy Australia. Disamping itu, sebagai salah satu negara maju terkemuka di kawasan Indo-Pasifik, Australia juga dipandang berpotensi menghasilkan persepsi ketidaksetaraan (persepsi Hiper-Pasifik) dalam hubungan dengan negara-negara lebih kecil dan berkembang di kawasan ini. Beberapa negara di kawasan mungkin melihat Australia sebagai negara di luar kawasan yang mencoba memainkan peran yang terlalu besar dalam dinamika regional Indo-Pasifik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap upaya *soft diplomacy* Australia (Widmaier, 2019).

Australia juga dipandang, terkadang memberikan fokus yang terlalu kuat pada aspek keamanan dalam diplomasinya sehingga dapat mengesampingkan isu-isu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang juga penting bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, meskipun Australia telah berupaya untuk memainkan peran dalam isu lingkungan di kawasan, tetapi terdapat kritik terhadap kebijakan lingkungan dalam negeri Australia, terutama terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kritik semacam ini dapat mengurangi efektivitas diplomasi lingkungan Australia (McDougall, 2018).

Terdapat pula fakta bahwa *soft diplomacy* memerlukan investasi sumber daya yang signifikan dalam hal waktu, tenaga, dan pendanaan. Australia menghadapi keterbatasan sumber daya yang dapat membatasi kemampuannya untuk menjalankan program *soft diplomacy* yang luas dan berkelanjutan di seluruh kawasan Indo-Pasifik (Wise, 2022). Hal ini juga berkorelasi dengan tidak konsistennya Australia dalam prioritas luar negeri Australia yang dapat mengalami perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain, dimana hal ini sangat bergantung pada terjadinya perubahan di dalam pemerintahan dan kebijakan yang dibuat. Ini dapat membuat negara-negara di kawasan merasa tidak yakin dengan konsistensi Australia dalam menjalankan *soft diplomacy* (Widmaier, 2019).

Kawasan Indo-Pasifik juga memiliki dinamika yang sangat kompleks dan bervariasi. Berbagai negara didalamnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan perubahan cepat dalam politik, ekonomi, dan keamanan regional dapat menjadi tantangan yang signifikan terkait upaya diplomasi Australia. Terkait hal ini, koordinasi dengan negara-negara tetangga dan mitra regional sangat penting sebagai upaya memastikan keberhasilan *soft diplomacy*. Kurangnya koordinasi regional dapat menghambat kemampuan Australia untuk mencapai tujuan *soft diplomacy*-nya (Bateman, 2017).

Fakta lain yang mengemuka adalah kawasan Indo-Pasifik merupakan arena persaingan pengaruh yang intensif antara berbagai kekuatan besar seperti China dan AS. Persaingan ini dapat menghambat kemampuan Australia untuk memanfaatkan *soft power* secara efektif, karena negara-negara lain juga berusaha mempengaruhi kawasan ini (Widmaier, 2019). Pada akhirnya, penting pula untuk dipahami bahwa *soft diplomacy* adalah upaya jangka panjang, dan keberhasilannya tidak dapat serta sulit diukur secara langsung. Australia perlu terus mengevaluasi strategi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam hubungannya dengan kawasan Indo-Pasifik.

Simpulan

Secara keseluruhan, kawasan Indo-Pasifik merupakan lingkungan geopolitik yang sangat penting bagi Australia. Negara ini memiliki kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan yang kuat di kawasan ini. Untuk itu, Australia berusaha untuk mempertahankan stabilitas, perdagangan, dan kerja sama regional di Indo-Pasifik demi kepentingan nasionalnya. Meskipun memiliki kelemahan, Australia masih memiliki potensi untuk memperkuat *soft power* dan *soft diplomacy*-nya di kawasan Indo-Pasifik dengan berfokus pada memahami kebutuhan dan aspirasi negara-negara tetangga, berinvestasi dalam hubungan bilateral dan multilateral, serta mempromosikan nilai-nilai dan budaya yang dapat mendukung kerja sama regional dan perdamaian.

Australia telah aktif menggunakan berbagai bentuk diplomasi publik, termasuk diplomasi budaya, pendidikan, dan diplomasi media, sebagai sarana untuk memperluas pengaruh *soft diplomacy*-nya, membangun hubungan yang kuat, dan mempromosikan nilai-nilai dan kepentingannya di kawasan tersebut. Dalam hal diplomasi budaya, Australia berupaya memperkenalkan keberagaman budaya dan seni Australia kepada masyarakat di kawasan Indo-Pasifik, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Australia, serta memperkuat ikatan antar budaya. Diplomasi pendidikan, khususnya melalui NCP dan beasiswa *Australia Awards*, juga menjadi instrumen penting bagi Australia dalam membangun hubungan yang berkelanjutan di kawasan tersebut, dengan menyediakan peluang pendidikan dan pertukaran akademik yang memperkuat jaringan orang-ke-orang dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di negara-negara mitra. Sementara itu, diplomasi media telah memungkinkan Australia untuk

menjangkau masyarakat di kawasan Indo-Pasifik dengan pesan-pesan yang disesuaikan, memperkuat citra Australia sebagai negara yang terbuka, inklusif, dan berperadaban tinggi.

Dengan memperkuat diplomasi publik sebagai bagian dari *soft diplomacy*-nya di kawasan Indo-Pasifik, Australia memiliki kemampuan untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan bersifat positif, khususnya dalam upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Kondisi ini membantu membangun kekuatan hubungan dan keberlanjutannya dengan negara-negara di sekitar, yang akan menjadi aset berharga bagi kepentingan nasional Australia dalam jangka panjang. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Australia dalam menerapkan *soft diplomacy* di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan dengan negara-negara lain yang juga aktif menggunakan *soft diplomacy*, persepsi Hiper-Pasifik, serta ketegangan politik dan keamanan yang memengaruhi efektivitas diplomasi, merupakan tantangan utama yang perlu diatasi oleh Australia. Selain itu, perubahan dinamika politik dan ekonomi di kawasan juga dapat memengaruhi strategi diplomasi Australia di masa depan. Dalam konteks ini, studi lanjutan dapat dikembangkan terkait efektivitas upaya *soft diplomacy* Australia dengan menggunakan metode pengukuran yang objektif dan relevan untuk menilai efektivitas *soft diplomacy* Australia tersebut di kawasan Indo-Pasifik. Studi lanjutan ini dapat mencakup indikator seperti perubahan dalam persepsi publik, hubungan bilateral yang diperkuat, dan dampak positif pada isu-isu regional.

Daftar Pustaka

- Adducul, L. A. M. (2018). The Indo-Pacific Construct in Australia's White Papers: Reflections for ASEAN-Australia Future Strategic Partnership. *CIRSS Commentaries* V, V(6), 5–7. <http://www.fsi.gov.ph/wp-content/uploads/2018/03/Vol-V-No-6-0314-The-Indo-Pacific-Construct-in-Australia's-White-Papers-Adducul.pdf>
- Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (2015). Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest? *International Journal of Cultural Policy*, 21(4), 365–381. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042474>
- Australian Embassy Indonesia. (2019). *Indonesia Retains Top Spot for Australian Students*. Media Release. https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR19_025.html
- Australian Government. (2017a). Opportunity Security Strength. *2017 Foreign Policy White Paper*, 1–5; 11–122. <https://www.fpwhitepaper.gov.au/>
- Australian Government. (2017b). *Public Diplomacy Strategy*. Departement of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/public-diplomacy-strategy>

- Australian Government. (2018). Australia Awards Scholarships Policy Handbook. In *Department of Foreign Affairs and Trade*. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indonesia-alumni-case-study.pdf>
- Australian Government. (2019). *Australia in the Asian Century Towards 2025: Indonesia Country Strategy*. Department of Foreign Affairs and Trade. <https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22publications/tailedpapers/69888%22>
- Australian Government. (2023). *Australian Cultural Diplomacy Grants Program (ACDGP)*. Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/acdgp/australian-cultural-diplomacy-grants-program>
- Bateman, S. (2017). Australia's Foreign Policy White Paper : Dealing with Uncertainty. *RSIS Working Paper*, 225.
- Byrne, C. (2009). *Public Diplomacy in an Australian Context: a Policy-based Framework to Enhance Understanding and Practice: Vol. Ph.D.Facul*. Bond University. <http://epublications.bond.edu.au/theses/48/>
- Byrne, C. (2016). Australia's New Colombo Plan: Enhancing Regional Soft Power Through Student Mobility. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 71(1), 107–128. <https://doi.org/10.1177/0020702015617786>
- Byrne, C., Conley Tyler, M., & Harris Rimmer, S. (2016). Australian Diplomacy Today. *Australian Journal of International Affairs*, 70(6), 581–589. <https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1220498>
- Crouch, M. (2021). *Closure of Indonesian Language Programs in Australian Universities will Weaken Ties between the Two Countries*. The Conversation. <https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries-158894>
- Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 31–54. <https://doi.org/10.1177/0002716207311952>
- Curry, H. (2021a). *Creativity and Crisis: Teaching Indonesian in Australian Schools*. University of Melbourne. <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/creativity-and-crisis-teaching-indonesian-in-australian-schools.amp>
- Curry, H. (2021b). *Indonesian Matters in Our Schools*. University of Melbourne. <https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/indonesian-matters-in-our-schools.amp>
- Evelyn, D. (2021). Australian Cultural Diplomacy Grants Program. *Ozip*. <https://ozip.com.au/index.php/australian-cultural-diplomacy-grants-program/>
- Fullilove, M. (2022). America and Australia Are Back on the Same Page: How Biden Revived the Alliance. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/australia/2022-02-11/america-and-australia-are-back-same-page>
- Gabriela Soehandoko, J. (2023). *Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams: Komitmen Jadi Mitra Strategis Kawasan*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230810/620/1683528/dubes-australia-untuk-indonesia-penny-williams-komitmen-jadi-mitra-strategis-kawasan>
- Karim, M. A. (2022). The QUAD Formation: Is It a High-politics Approach? Ramification for South Asia and Bangladesh. *Korean Journal of Defense Analysis*, 34(1), 125–139. <https://doi.org/10.22883/kjda.2022.34.1.007>
- Kremmer, C. (2014). *Australian Public Diplomacy the Real Loser in ABC Cuts*. The

- Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australian-public-diplomacy-real-loser-abc-cuts>
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). *Public Diplomacy*. Foreign Policy Centre.
- Lowy Institute for International Policy. (2017). *International Broadcasting and its Contribution to Public Diplomacy, Working Paper*. https://archive.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/O%27Keeffe_and_Oliver_International_broadcasting_WP_full_1.pdf
- McDougall, D. (2018). Australia's 2017 Foreign Policy White Paper: Deconstruction and Critique. *The Round Table*, 107(3), 279–290. <https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1476094>
- Medcalf, R. (2019). An Australian Vision of The Indo-Pacific and What It Means for Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 53–60. <https://www.jstor.org/stable/26939686>
- Melissen, Jan. (2005). "The New Environment", Jan Melissen (ed.), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. New York: Palgrave MacMillan.
- Nye Jr., J. (2011). *The Future of Power*. Public Affairs.
- Nye, Jr., J. (2022). Realism About Foreign-Policy Realism. *Project Syndicate*. <https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-and-limits-of-foreign-policy-realism-by-joseph-s-nye-2022-02>
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- O'Keeffe, A., & Greene, C. (2019). *International Public Broadcasting: A Missed Opportunity for Projecting Australia's Soft Power*. December. <https://apo.org.au/node/271531>
- Parliament of Australia. (2019a). *Chapter 4 - Public Diplomacy in Australia*. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004-07/public_diplomacy/report/c04#c04f4
- Parliament of Australia. (2019b). *Chapter 5 - The Challenges Facing Australia as a Medium-Sized Country Pursuing Effective Public Diplomacy*. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004-07/public_diplomacy/report/c05
- Rosser, A. (2021a). *A Good Idea Gone Nowhere? Diaspora policy in Australia*. The Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/good-idea-gone-nowhere-diaspora-policy-australia>
- Rosser, A. (2021b). Failing to Engage: The Politics of Diaspora Policy in Australia. *Melbourne Asia Review*, 8. <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X8.8>
- Sharma, D. (2019). *Taking Australian Diplomacy Digital*. Australian Strategic Policy Institute. <https://www.aspistrategist.org.au/taking-australian-diplomacy-digital/>
- Ton, W. (2023). *Funding Plea to Stop ABC Losing its Voice in Pacific*. National Indigenous Times. <https://nit.com.au/22-06-2023/6477/funding-plea-to-stop-abc-losing-its-voice-in-pacific-aap23>
- Widmaier, W. W. (2019). Australian Foreign Policy in Political Time: Middle Power Creativity, Misplaced Friendships, and Crises of Leadership. *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 143–159. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1570486>

Wise, J. (2022). *It's time to Restore Funding to Australia's Diplomacy*. Australian Strategic Policy Institute. <https://www.aspistrategist.org.au/its-time-to-restore-funding-to-australias-diplomacy/>